

Dampak Pengembangan Wisata Halal terhadap Kinerja
UMKM Lokal di Pangkalpinang

Ulfa ^{1*}, Agung Rizki Putra ²

^{1*} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka
Belitung, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia.

² Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka
Belitung, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia.

Corresponding Email : ulfa@ubb.ac.id ^{1*}

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan wisata halal terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang. Pengembangan wisata halal menjadi salah satu strategi pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada nilai-nilai syariah, dengan melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia layanan dan produk ramah muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 130 pelaku UMKM yang terlibat dalam sektor pariwisata. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda, serta melalui uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, yang tercermin dari peningkatan pendapatan, perluasan pasar, dan peningkatan kualitas produk. Dukungan pemerintah juga terbukti berperan penting dalam memperkuat infrastruktur, regulasi, dan pemberdayaan pelaku usaha. Hasil ini sejalan dengan teori Ekonomi Lokal dan konsep wisata halal, yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal dan nilai-nilai religius dalam pembangunan berkelanjutan. Temuan ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wisata halal sebagai penggerak ekonomi daerah.

Kata kunci: Wisata Halal; UMKM; Kinerja; Ekonomi Lokal; Pariwisata.

Abstract. This study aims to analyze the influence of halal tourism development on the performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Pangkalpinang City. Halal tourism development is considered a strategic approach to promoting local economic growth based on Islamic values, involving local business actors as providers of Muslim-friendly products and services. A quantitative approach was used, with a survey conducted among 130 MSME actors engaged in the tourism sector. The data were analyzed using multiple linear regression, along with classical assumption tests and hypothesis testing. The results indicate that halal tourism development has a positive and significant effect on MSME performance, as reflected in increased income, market expansion, and product quality improvement. Government support also plays a crucial role in strengthening infrastructure, regulations, and business empowerment. These findings align with Local Economic Theory and the concept of halal tourism, both of which emphasize the importance of leveraging local resources and religious values for sustainable development. The study recommends strong synergy between the government, MSMEs, and local communities to optimize halal tourism potential as a driver of regional economic growth.

Keywords: Halal Tourism; MSMEs; Performance; Local Economy; Tourism.

Pendahuluan

Wisata halal telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu tren utama dalam industri pariwisata global. Wisata halal merujuk pada perjalanan yang mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim, dengan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti makanan halal, tempat ibadah, penginapan yang ramah Muslim, serta kegiatan wisata yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut *Global Muslim Travel Index* (GMTI, 2023), lebih dari 160 juta turis Muslim telah berkunjung ke berbagai destinasi di seluruh dunia, dengan proyeksi jumlah tersebut meningkat hingga 230 juta pada tahun 2028. Angka ini menunjukkan adanya potensi pasar yang besar dalam sektor wisata halal (CrescentRating, 2023). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang strategis untuk mengembangkan destinasi wisata halal yang dapat mendukung promosi budaya Islam serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Wisata halal telah menjadi salah satu sektor utama dalam industri pariwisata global, dan permintaan terhadapnya terus meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik wisatawan Muslim, baik domestik maupun internasional, melalui pengembangan destinasi wisata halal yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia telah menjadikan beberapa daerah sebagai prioritas dalam pengembangan wisata halal, di antaranya Lombok, Aceh, Sumatera Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Selain memberikan nilai budaya dan memperluas pasar wisata, pengembangan destinasi-destinasi ini juga bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal, yang salah satunya melalui pemberdayaan UMKM yang terlibat dalam rantai pasokan layanan wisata halal. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2022), UMKM berperan sangat penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 97% tenaga kerja dan

sekitar 99% unit usaha. Di sektor wisata halal, UMKM menyediakan berbagai produk dan layanan seperti kuliner halal, souvenir Islami, akomodasi berbasis syariah, dan transportasi lokal, yang semuanya berpotensi meningkatkan keuntungan dan memperluas pasar mereka. Namun, meskipun banyak pelaku UMKM yang terlibat dalam sektor wisata halal, mereka masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan dalam memperoleh sertifikasi halal, kurangnya pelatihan yang relevan mengenai bisnis berbasis syariah, serta keterbatasan pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi digital untuk mempromosikan produk mereka kepada konsumen Muslim. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penelitian lebih lanjut yang secara empiris mengukur dampak langsung pengembangan wisata halal terhadap kinerja UMKM di daerah tersebut. Keterlibatan UMKM dalam pengembangan destinasi wisata halal sangat penting, mengingat peran mereka sebagai tulang punggung ekonomi lokal. UMKM berperan dalam menyediakan layanan dan produk pendukung wisata halal, seperti kuliner, penginapan syariah, oleh-oleh lokal, serta jasa pemandu wisata. Melalui pengembangan sektor ini, UMKM dapat memperluas skala usaha, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara langsung dampak ekonomi pengembangan wisata halal terhadap UMKM lokal di Kota Pangkalpinang, sebuah daerah yang berupaya mengoptimalkan potensi wisata halal sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Dengan memahami sejauh mana pengembangan wisata halal berdampak pada kinerja UMKM, diharapkan pemerintah daerah, sektor industri, dan stakeholder terkait dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung UMKM, baik dari sisi pelatihan, akses pembiayaan, maupun pengembangan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada tren global, tetapi juga pada pemanfaatan wisata halal sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat

akar rumput. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkalpinang, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengembangan wisata halal. Pemerintah daerah, bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai lembaga terkait, telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memajukan sektor ini. Pada Desember 2023, Pasar Mambo di Pangkalpinang diresmikan sebagai Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat pertama di Provinsi Babel.

Pengembangan kuliner lokal menjadi bagian dari destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan Muslim. Di sisi lain, pada Juli 2023, sebanyak 39 pengusaha UMKM di Kota Pangkalpinang telah mengikuti pelatihan penyelia halal yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM lokal dalam pasar wisata halal. Konsep ekonomi lokal merujuk pada kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam wilayah geografis tertentu, seperti kota, kabupaten, atau daerah. Fokus dari ekonomi lokal adalah pada pengembangan kapasitas ekonomi serta pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Blakely & Leigh, 2013).

Local Economic Development (LED) adalah proses kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kondisi ekonomi lokal yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. LED berfokus pada pemanfaatan potensi lokal, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Todaro & Smith, 2015). LED sangat relevan dalam konteks pengembangan wisata halal, karena dapat memberdayakan UMKM lokal agar dapat beradaptasi dan mengambil keuntungan dari peluang pasar wisata halal yang terus berkembang. Melalui pelatihan, sertifikasi halal, dan akses pasar, UMKM dapat memperkuat daya saingnya dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pendekatan LED juga mendorong pembangunan infrastruktur serta fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, seperti akomodasi halal dan fasilitas ibadah.

Pengembangan wisata halal berbasis LED dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan (Aziz & Ahmad, 2018).

Tinjauan Literatur

Teori Wisata Halal

Wisata halal merujuk pada jenis pariwisata yang menyediakan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, memungkinkan wisatawan Muslim menikmati pengalaman wisata yang nyaman dan sesuai dengan ajaran agama (Battour & Ismail, 2016). Selain mencakup penyediaan makanan halal, konsep wisata halal juga mencakup aspek akomodasi, transportasi, aktivitas wisata, dan fasilitas ibadah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rahman & Al-Hamarneh, 2020). Battour dan Ismail (2016) menjelaskan bahwa wisata halal tidak hanya terbatas pada penyediaan makanan dan akomodasi, tetapi juga meliputi strategi pengembangan destinasi, sertifikasi halal, serta promosi untuk menarik wisatawan Muslim. El-Gohary (2016) menekankan bahwa wisata halal membuka peluang baru bagi produk dan layanan UMKM, khususnya yang terkait dengan kuliner halal, penginapan berbasis syariah, dan transportasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian Henderson (2016) juga menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal di kawasan Asia Tenggara telah berhasil meningkatkan pendapatan UMKM melalui diversifikasi layanan dan dukungan kebijakan pemerintah. Menurut Hanafi, Rahman, dan Hamzah (2019), wisata halal memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari pariwisata konvensional, antara lain:

- 1) Makanan dan Minuman Halal: Semua makanan dan minuman yang disajikan harus memiliki sertifikasi halal.
- 2) Fasilitas Ibadah: Penyediaan ruang ibadah (mushola atau masjid), tempat wudhu yang bersih, serta jadwal waktu shalat yang jelas.
- 3) Akomodasi Ramah Muslim: Akomodasi yang memisahkan area pria dan wanita serta tidak menyediakan minuman keras.
- 4) Aktivitas Wisata yang Sesuai Syariah: Aktivitas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti menghindari hiburan yang bersifat maksiat.

Seiring dengan meningkatnya populasi Muslim global dan pertumbuhan pendapatan kelas menengah Muslim, pasar wisata halal diperkirakan akan mencapai miliaran dolar AS pada tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 6-7% (CrescentRating, 2023). Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki telah menjadi tujuan utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman wisata halal. Selain manfaat ekonomi, pengembangan wisata halal juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan daerah, dan pemberdayaan bisnis kecil dan menengah lokal yang menawarkan barang dan jasa halal (Henderson, 2016). Namun, sektor wisata halal juga menghadapi tantangan, seperti persyaratan sertifikasi halal yang ketat, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta kurangnya infrastruktur yang memadai untuk memenuhi standar halal (Battour *et al.*, 2019). Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, pemerintah telah meluncurkan program-program pengembangan wisata halal di daerah-daerah strategis seperti Lombok, Aceh, dan Bangka Belitung, yang bertujuan untuk menarik wisatawan Muslim domestik dan internasional (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2022). Pengembangan ini diharapkan dapat memberdayakan UMKM lokal untuk memproduksi produk halal yang lebih berdaya saing. Pengembangan wisata halal juga sejalan dengan prinsip *sustainable tourism development*. Menurut Saarinen (2021), pariwisata berkelanjutan harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, *community-based tourism* (CBT) yang menekankan peran serta masyarakat lokal, termasuk UMKM, sangat penting dalam menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat melalui pariwisata (Manyara & Jones, 2007). Ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal yang melibatkan UMKM secara aktif dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat.

Pengaruh Pengembangan Wisata Halal terhadap Kinerja UMKM

Pengembangan wisata halal dapat memberikan dampak signifikan terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),

terutama di wilayah yang memiliki potensi pariwisata religius, seperti Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Teori Ekonomi Lokal, penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan perekonomian daerah. Wisata halal, yang mengutamakan prinsip syariah dalam layanan seperti makanan halal, akomodasi berbasis syariah, dan destinasi religius, memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta melakukan inovasi yang berujung pada peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional. Secara teori, berkembangnya sektor wisata halal akan menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini mencakup peningkatan permintaan terhadap produk lokal, penciptaan lapangan kerja baru, dan distribusi ekonomi yang lebih merata. Penelitian Rahmawati *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa pengembangan wisata halal membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang dan berdaya saing. Selain itu, Siregar & Lubis (2021) juga menemukan bahwa UMKM yang berada di sekitar destinasi wisata halal mengalami peningkatan pendapatan serta perluasan skala usaha.

Peningkatan kinerja UMKM juga sejalan dengan perspektif *Local Economic Development* (LED), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi lokal dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi daerah, termasuk sektor wisata halal yang dapat menjadi unggulan ekonomi daerah. UMKM memainkan peran sentral dengan menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan Muslim, seperti kuliner halal, penginapan syariah, serta layanan transportasi dan kerajinan lokal. Battour dan Ismail (2016) menunjukkan bahwa wisata halal dapat memperluas pasar bagi UMKM, dengan meningkatnya permintaan atas produk dan layanan halal. Temuan dari El-Gohary (2016) juga mendukung hal ini, dengan menyatakan bahwa wisata halal menciptakan pasar baru yang memberikan dampak langsung pada peningkatan omzet dan kepuasan pelanggan UMKM. Lebih lanjut, Henderson (2016) menemukan bahwa sektor wisata halal di Asia Tenggara telah berperan sebagai katalis dalam pertumbuhan UMKM, dengan dukungan

regulasi dan promosi destinasi Islami. Ranjan dan Ray (2021) menjelaskan bahwa kinerja UMKM tidak hanya tercermin dari kinerja finansial, tetapi juga dari inovasi, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan usaha yang dipengaruhi oleh permintaan dari sektor pariwisata halal. Berdasarkan temuan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: H1: Pengembangan wisata halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan wisata halal dan dukungan pemerintah terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pangkalpinang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada potensi besar Kota Pangkalpinang dalam mengembangkan wisata berbasis nilai-nilai Islam, serta aktivitas UMKM yang terus berkembang pesat di sektor tersebut. Penelitian ini dilaksanakan selama periode Agustus 2025, dengan proses pengumpulan data menggunakan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terlibat dalam sektor-sektor yang mendukung pengembangan wisata halal, seperti usaha kuliner halal, penginapan berbasis syariah, kerajinan lokal, dan jasa transportasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pangkalpinang pada tahun 2024, jumlah UMKM yang terdaftar sekitar 27.000 unit. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 10–15% beroperasi dalam sektor yang mendukung wisata halal, seperti kuliner halal, akomodasi syariah, kerajinan lokal, dan layanan transportasi. Diperkirakan ada sekitar 2.500–3.500 UMKM yang relevan untuk penelitian ini. Untuk pengambilan sampel, digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pelaku UMKM yang telah beroperasi minimal dua tahun.
- 2) UMKM yang bergerak di sektor yang mendukung pengembangan wisata halal.
- 3) UMKM yang telah memiliki logo dan sertifikasi halal.

Penyebaran kuisioner dilakukan selama dua minggu, dengan jumlah responden yang diperoleh sebanyak 130 orang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis struktural, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Selain itu, uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi (*Breusch-Pagan Test*) juga diterapkan untuk memastikan kecocokan model. Hasil dari analisis ini akan menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kinerja UMKM, dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa efektif kebijakan serta pengembangan sektor wisata halal dalam memperkuat ekonomi lokal melalui UMKM.

Variabel Penelitian

1) Pengembangan Wisata Halal (X1)
Variabel ini diukur melalui beberapa indikator yang relevan dengan literatur terdahulu, antara lain:

- a) Atraksi Halal: Penyediaan tempat wisata yang ramah Muslim.
- b) Akomodasi Halal: Hotel dan penginapan berbasis syariah.
- c) Kuliner Halal: Makanan yang memiliki sertifikasi halal.
- d) Layanan Ibadah: Penyediaan fasilitas ibadah yang memadai (mushola, masjid, tempat wudhu).
- e) Promosi Berbasis Syariah: Kampanye yang menonjolkan identitas halal destinasi tersebut.

Indikator-indikator ini menggambarkan sejauh mana destinasi wisata di Kota Pangkalpinang menyediakan pengalaman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang dapat mendorong wisatawan Muslim untuk berkunjung.

2) Dukungan Pemerintah (X2)

Variabel ini dioperasionalkan melalui lima indikator utama, yaitu:

- a) Kebijakan dan Regulasi: Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan wisata halal dan UMKM.
- b) Pembiayaan: Akses terhadap pembiayaan dan modal untuk pelaku UMKM.
- c) Pelatihan dan Pendampingan: Program-program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan UMKM.

- d) Fasilitas Promosi: Upaya pemerintah dalam mempromosikan produk UMKM melalui event pariwisata halal.
- e) Infrastruktur Pendukung: Penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan wisata halal, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum.

Indikator-indikator ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha lokal, melalui kebijakan, fasilitas, serta pemberian akses yang memadai.

3) Kinerja UMKM (Y)

Variabel kinerja UMKM (Y) diukur dengan menggunakan kombinasi indikator finansial dan non-finansial. Indikator finansial mencakup tiga aspek utama: pertama, pertumbuhan pendapatan, yang mengukur kenaikan pendapatan UMKM selama periode tertentu; kedua, pertumbuhan laba, yang mencerminkan peningkatan laba yang diperoleh dari aktivitas usaha; dan ketiga, stabilitas arus kas, yang menunjukkan sejauh mana UMKM dapat mengelola aliran kasnya dengan efisien. Sementara itu, indikator non-finansial meliputi beberapa faktor yang menggambarkan keberhasilan operasional dan perkembangan UMKM, yaitu: kepuasan pelanggan, yang mencakup tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan yang disediakan oleh UMKM; tingkat inovasi produk dan jasa, yang menilai kemampuan UMKM dalam menciptakan produk dan layanan baru yang relevan dengan permintaan pasar; peningkatan jumlah pelanggan, yang mencerminkan pertumbuhan dalam jumlah pelanggan yang dilayani oleh UMKM; dan pertumbuhan usaha, yang mengukur ekspansi usaha

melalui penambahan cabang atau peningkatan jumlah tenaga kerja. Kombinasi dari indikator-indikator ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa UMKM dalam mendukung pengembangan wisata halal.

Kombinasi indikator finansial dan non-finansial ini memberikan gambaran komprehensif mengenai performa UMKM dalam mendukung pengembangan wisata halal di Kota Pangkalpinang.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan profil responden dan memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang diteliti, yakni pengembangan wisata halal, dukungan pemerintah, dan kinerja UMKM. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai karakteristik dasar dari sampel penelitian, serta menunjukkan distribusi data pada masing-masing variabel yang akan dianalisis lebih lanjut. Melalui statistik deskriptif, penelitian ini dapat memperlihatkan rata-rata, standar deviasi, serta rentang nilai untuk setiap variabel, yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut menggunakan metode regresi linier berganda. Dengan cara ini, dapat diperoleh informasi awal yang penting mengenai bagaimana pengembangan wisata halal dan dukungan pemerintah mempengaruhi kinerja UMKM.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Rata-rata	Standar Deviasi	Nilai Min	Nilai Max
Pengembangan Wisata Halal	130	3,65	0,72	2,20	4,80
Dukungan Pemerintah	130	3,58	0,68	2,00	4,75
Kinerja UMKM	130	3,71	0,70	2,00	5,00

Dari 130 responden yang berpartisipasi, mayoritas pelaku UMKM berfokus pada usaha kuliner halal dan kerajinan lokal. Sebagian besar dari mereka sudah menjalankan usaha lebih dari tiga tahun. Berdasarkan analisis deskriptif, variabel pengembangan wisata halal memiliki

nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,65 dengan standar deviasi 0,72. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pengembangan wisata halal di Kota Pangkalpinang dalam kategori yang cukup positif. Untuk variabel dukungan pemerintah,

nilai rata-rata yang diperoleh adalah 3,58 dengan standar deviasi 0,68, yang mengindikasikan bahwa pelaku UMKM umumnya merasakan adanya dukungan dari pemerintah, meskipun ada variasi dalam pendapat mereka terkait dengan jenis dan konsistensi dukungan tersebut. Sedangkan untuk variabel kinerja UMKM, nilai rata-rata sebesar 3,71 dengan standar deviasi 0,70 menunjukkan bahwa UMKM di Kota Pangkalpinang sudah menunjukkan kinerja yang baik, terutama dalam hal kepuasan pelanggan dan perkembangan usaha. Angka rata-rata yang tinggi pada ketiga variabel ini

mengindikasikan bahwa perkembangan wisata halal dan dukungan pemerintah berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan dan performa usaha UMKM di daerah ini.

Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan kelayakan model regresi, dilakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk pada data residual. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi $p > 0,05$, yang menandakan bahwa distribusi residual mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, asumsi normalitas model regresi dapat diterima.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas	Statistik Shapiro-Wilk	Sig. (p-value)	Kesimpulan
Residual	0,982	0,245	Normal ($p > 0,05$)

Salah satu asumsi penting dalam analisis regresi linier berganda adalah bahwa data residual dari model regresi harus mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, uji normalitas dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode Shapiro-Wilk, yang lebih sensitif ketika jumlah sampel kurang dari 200. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,245, yang lebih besar dari 0,05. Ini menandakan bahwa tidak ada penyimpangan signifikan dari distribusi normal, sehingga data residual dapat dianggap berdistribusi normal. Temuan ini diperkuat dengan pengamatan pada histogram residual yang membentuk pola sesuai dengan plot Q-Q, yang mengikuti garis diagonal dan menunjukkan kurva berbentuk lonceng. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi ini telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas antar variabel independen, digunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 5, yang berarti tidak ada gejala multikolinearitas yang signifikan dalam model. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap variabel independen dalam model regresi ini tidak saling berkorelasi secara berlebihan, sehingga dapat digunakan secara bersama-sama tanpa mempengaruhi keakuratan hasil estimasi koefisien regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Pengembangan Wisata Halal	0,755	1,325	Tidak terjadi multikolinearitas
Dukungan Pemerintah	0,755	1,325	Tidak terjadi multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan linier yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel independen, yakni pengembangan wisata halal dan dukungan pemerintah, memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 5, yang berarti tidak ada gejala multikolinearitas yang signifikan. Nilai

VIF yang rendah ini mengindikasikan bahwa masing-masing variabel independen bersifat bebas satu sama lain secara statistik. Penggunaan kedua variabel tersebut dalam model regresi tidak akan memengaruhi validitas estimasi koefisien regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *Breusch-Pagan Test* untuk memeriksa apakah terdapat ketidaksesuaian varians residual dalam model regresi. Hasil pengujian menunjukkan nilai $p\text{-value} > 0,05$, yang berarti tidak ada indikasi

heteroskedastisitas dalam model. Dengan kata lain, varians residual dalam model ini bersifat konstan (homoskedastis), yang menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji	Chi-Square	df	Sig. (p-value)	Kesimpulan
Breusch-Pagan Test	2,487	2	0,289	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model regresi, yang dapat mempengaruhi validitas estimasi koefisien regresi. Penelitian ini menggunakan *Breusch-Pagan Test* untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas. Hasil analisis menunjukkan nilai *Chi-Square* sebesar 2,487 dengan derajat kebebasan (df) 2 dan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,289. Karena nilai p lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model ini. Oleh karena itu, hipotesis bahwa model regresi memiliki varians residual yang konstan (homoskedastisitas) diterima,

yang berarti model ini memenuhi salah satu asumsi dasar regresi klasik.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan *Durbin-Watson Test* untuk memeriksa adanya korelasi antara residual satu dengan lainnya dalam model regresi. Hasil uji menunjukkan nilai *Durbin-Watson* yang mendekati angka 2, yang mengindikasikan bahwa tidak ada autokorelasi antar residual. Ini berarti model regresi bebas dari masalah autokorelasi, sehingga asumsi independensi residual dalam regresi linier berganda terpenuhi.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Regresi	Durbin-Watson	Rentang Nilai	Kesimpulan
Pengembangan Wisata Halal dan Dukungan Pemerintah terhadap Kinerja UMKM	1,942	1,5 – 2,5	Tidak terjadi autokorelasi

Pada model regresi, uji autokorelasi dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara residual satu dengan yang lainnya. Adanya autokorelasi dapat merusak validitas inferensial dan melanggar asumsi dasar regresi klasik, terutama pada data yang terurut waktu atau data yang bersifat sistematis. Penelitian ini menggunakan *Durbin-Watson Test* (DW) untuk menguji autokorelasi, dengan hasil yang menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,942, yang berada dalam rentang toleransi antara 1,5 dan 2,5. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. Oleh karena itu, asumsi independensi residual dapat diterima, dan data residual pada model ini dapat dianggap bebas satu sama lain.

Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa variabel pengembangan wisata halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,421 dengan nilai t-hitung 4,756 dan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengembangan wisata halal di suatu daerah, semakin baik kinerja UMKM di daerah tersebut. Di sisi lain, variabel dukungan pemerintah juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,398, t-hitung 4,302, dan nilai signifikansi 0,000. Ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah turut mendorong peningkatan kinerja UMKM.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	t-hitung	Sig. (p-value)	Kesimpulan
Pengembangan Wisata Halal	0,421	4,756	0,000	Signifikan (H1 diterima)
Dukungan Pemerintah	0,398	4,302	0,000	Signifikan (H2 diterima)

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, dengan nilai F-hitung sebesar 45,623 dan p-value 0,000. Dengan demikian, kedua hipotesis penelitian dapat diterima.

Tabel 7. Hasil Uji F

F-hitung	Sig. (p-value)	Kesimpulan
45,623	0,000	Signifikan

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, setiap peningkatan satu satuan dalam pengembangan wisata halal akan meningkatkan kinerja UMKM sebesar 0,421 satuan, dengan nilai t-hitung 4,756 dan p-value 0,000 ($p < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin berkembangnya destinasi wisata halal, seperti peningkatan fasilitas ramah Muslim, promosi wisata religi, dan dukungan infrastruktur syariah, dapat membuka peluang bisnis baru, meningkatkan jumlah pengunjung, dan memperluas pasar bagi produk UMKM lokal.

Pengembangan wisata halal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja UMKM, khususnya dalam meningkatkan pendapatan, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Ekonomi Lokal, yang menekankan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah. Pengembangan wisata halal dapat menciptakan efek ganda (multiplier effect), dengan membuka peluang bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam penyediaan produk dan layanan pendukung, seperti kuliner halal, kerajinan, pemandu wisata, dan transportasi lokal. Meningkatnya permintaan atas produk

halal dari wisatawan Muslim mendorong UMKM untuk berinovasi dan meningkatkan kapasitas produksinya, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengembangan wisata halal dapat berfungsi sebagai alat strategis dalam mengimplementasikan teori ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat melalui optimalisasi potensi daerah. Penelitian ini juga mendukung konsep wisata halal, yang menyediakan layanan wisata sesuai dengan prinsip syariah, termasuk makanan halal, fasilitas ibadah, dan akomodasi berbasis Islam. Temuan ini memperkuat argumen bahwa wisata halal tidak hanya bernilai religius, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi UMKM. Konsep wisata halal mendorong inklusivitas bagi wisatawan Muslim dan menciptakan ekosistem bisnis yang ramah terhadap kebutuhan spiritual, tanpa mengabaikan inovasi dan kualitas layanan. Untuk daerah seperti Kota Pangkalpinang, yang memiliki potensi dan budaya religius, wisata halal dapat dijadikan pilar utama dalam pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai keagamaan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah, pelaku industri, dan akademisi perlu bekerja sama untuk mengembangkan strategi pengembangan wisata halal yang berkelanjutan dan memberdayakan UMKM sebagai aktor utama dalam rantai nilai ekonomi halal. Dukungan pemerintah juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, yang sejalan dengan Teori Kelembagaan yang menjelaskan pentingnya peran institusi dalam membentuk perilaku dan kinerja organisasi melalui regulasi, norma, dan dukungan formal. Dalam hal ini, dukungan pemerintah terhadap UMKM, seperti melalui kebijakan yang mendukung, pelatihan, akses pembiayaan, dan fasilitasi pemasaran, bertindak sebagai pendorong eksternal yang memperkuat kapabilitas internal UMKM untuk

meningkatkan kinerja usaha mereka. Ketika pemerintah memberikan dukungan yang tepat, pelaku UMKM dapat mengurangi hambatan struktural, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan kompetensi manajerial. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, dan inovasi layanan, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah secara signifikan meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM, terutama setelah pandemi. Penelitian oleh Wijaya dan Sari (2020) serta Putri dan Nugroho (2021) juga menunjukkan bahwa bantuan pemerintah, seperti subsidi dan pelatihan kewirausahaan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas UMKM di berbagai sektor. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong UMKM agar lebih adaptif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan ekonomi lokal dan global. Implikasi praktisnya adalah bahwa pemerintah daerah, seperti di Kota Pangkalpinang, perlu memperkuat program pemberdayaan UMKM dengan memperhatikan kebutuhan spesifik pelaku usaha, seperti akses permodalan syariah, pelatihan manajemen berbasis digital, serta promosi terpadu dalam sektor wisata halal. Dukungan pemerintah tidak hanya harus bersifat jangka pendek, tetapi harus terintegrasi dalam kebijakan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Peningkatan koordinasi antara dinas pariwisata, koperasi dan UMKM, serta pelaku industri halal dapat memperkuat rantai nilai ekonomi daerah dan menciptakan multiplier effect yang lebih luas. Bagi peneliti dan akademisi, hasil ini membuka peluang untuk mengembangkan model kolaborasi antara pemerintah, UMKM, dan sektor pariwisata yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengembangan wisata halal memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja

UMKM di Kota Pangkalpinang. Berbagai aspek dalam wisata halal, seperti fasilitas akomodasi syariah, kuliner halal, dan destinasi religi, telah mendorong partisipasi aktif UMKM lokal dalam ekosistem ekonomi berbasis syariah. Dukungan pemerintah terbukti memainkan peran krusial dalam mempercepat pengembangan wisata halal, dengan melalui regulasi yang mendukung, promosi, serta fasilitasi sertifikasi halal dan pelatihan usaha. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan Muslim, permintaan akan produk dan layanan halal juga meningkat, memberikan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperluas jaringan pasar. Temuan ini menegaskan bahwa wisata halal tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi pelaku usaha lokal. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah daerah Kota Pangkalpinang terus memperkuat dukungannya terhadap pengembangan wisata halal, melalui kebijakan yang mendukung UMKM. Ini bisa meliputi pelatihan usaha berbasis syariah, fasilitasi sertifikasi halal, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata ramah Muslim. Pelaku UMKM juga diharapkan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip halal serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat lokal sangat penting dalam menciptakan ekosistem wisata halal yang berkelanjutan dan inklusif. Masyarakat setempat diharapkan untuk lebih aktif dalam mendukung nilai-nilai budaya dan religius yang menjadi daya tarik utama dari wisata halal, sehingga potensi daerah dapat dioptimalkan sebagai pilar pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini. Terutama kepada para responden yang telah meluangkan

waktu untuk mengisi kuesioner dan memberikan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan pendanaan melalui skema hibah penelitian dosen muda, yang memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: realities and opportunities. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 47.
- Battour, M. (2017). Muslim travel behavior in halal tourism. In *Mobilities, tourism and travel behavior-contexts and boundaries*. InTechOpen.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism management perspectives*, 19, 150-154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.
- Battour, M., Battor, M., & Ismail, M. N. (2019). The impact of destination attributes on Muslim tourist satisfaction and loyalty. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 470-487.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). *Planning local economic development*. Sage.
- Chang, T. C. (2011). Islamic Tourism in Singapore: Trends & Prospects. In *Presentation at world Islamic tourism conference* (pp. 12-13).
- Dealwis, C., Johari, A., & Morni, A. (2022, September). The perception of non-Muslim tourists towards halal tourism: a case study in Kuching, Sarawak. In *Proceedings Borneo Islamic International Conference eISSN 2948-5045* (Vol. 13, pp. 01-12).
- Ding, G., & Wu, J. (2022). Influence of tourism safety perception on destination image: A case study of Xinjiang, China. *Sustainability*, 14(3), 1663.
- Firdaus, P. (2022). *Pengaruh Parivisata Halal Terhadap Loyalitas Wisatawan Muslim Untuk Mengunjungi Bali* (Doctoral dissertation).
- Harris, R. (2024). The aesthetics and imaginaries of Uyghur heritage, Chinese Tourism, and the Xinjiang dance craze. *International Journal of Heritage Studies*, 30(8), 872-887. <https://doi.org/10.1080/13527258.2024.2342289>.
- Henderson, J. C. (2010). Sharia-compliant hotels. *Tourism and Hospitality research*, 10(3), 246-254. <https://doi.org/10.1057/thr.2010.3>.
- Hidayat, D. (2020). Dampak Destinasi Wisata Halal Terhadap Pemanfaatan Potensi Ekonomi Kreatif Bagi Masyarakat Di Gunung Luhur Negeri Di Atas Awan. *Aksioma Al-Musaqob*, 3(2), 15-26. <https://doi.org/10.55171/jam.v3i2.957>.
- Hidayatullah, S. (2023). Analisis Optimalisasi Wisata Religi Berbasis Halal Tourism Terhadap Daya Tarik Wisatawan Muslim Di Jembrana Bali.
- Jia, X., & Chaozhi, Z. (2020). "Halal tourism": Is it the same trend in non-Islamic destinations with Islamic destinations? *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 25(2), 189-204.
- Keliat, C., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2022). Sustainable halal tourism in the post pandemic era: Opportunity and challenges. *Journal of Research on Business and Tourism*, 2(1), 69-77. <https://doi.org/10.37535/104002120226>.
- Manyara, G., & Jones, E. (2007). Community-based tourism enterprises development in Kenya: An exploration of their potential as avenues of poverty reduction. *Journal of sustainable tourism*, 15(6), 628-644.

- Nasuha, I. (2022). Implementation of Halal Tourism in Non-Muslim Countries (Study in Thailand). In *International Conference on Islamic Studies (ICIS)* (pp. 1360-1366).
- Rahmi, A. N. (2020). Perkembangan pariwisata halal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v11i1.226>.
- Rasul, T. (2019). The trends, opportunities and challenges of halal tourism: a systematic literature review. *Tourism Recreation Research*, 44(4), 434-450. <https://doi.org/10.1080/02508281.2019.1599532>.
- Rusdi, R., & Utomo, Y. T. (2024). Peluang Dan Tantangan Pariwisata Halal Di Indonesia: Perspektif Dakwah Ekonomi. *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 2(4), 1-13.
- Shaffer, R., Deller, S., & Marcouiller, D. (2004). *Community economics: linking theory and practice* (No. Ed. 2, pp. xviii+-363).
- Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2006). *Regional economic development: analysis and planning strategy*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th editi). Essex Pearson Education Limited.
- Yousaf, S., & Xiucheng, F. (2018). Halal culinary and tourism marketing strategies on government websites: A preliminary analysis. *Tourism Management*, 68, 423-443. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.04.006>.
- Zamani-Farahani, H., & Henderson, J. C. (2010). Islamic tourism and managing tourism development in Islamic societies: the cases of Iran and Saudi Arabia. *International journal of tourism research*, 12(1), 79-89.